



Gubernur: Lembaga Pemeriksa Keuangan Yang Sah Hanya BPK

Pontianak. Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH menegaskan, satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan yang direkomendasikan pemerintah melalui Undang-undang Dasar hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dalam Rangka Pemeriksaan keuangan, BPK didirikan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Cuma kadang-kadang masih ada orang yang tidak mau pakai BPK, ndak tahu apa sebab. Kecuali audit tertentu. Dalam internal dibantulah Irjen, diluar itu nggak ada. Kalau di daerah ada Inspektorat," ungkapnya, belum lama ini.

Ia meminta semua kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemprov Kalbar harus mengerti mengenai pemeriksaan keuangan itu. "Saya mohon kepala-kepala SKPD juga jangan sampai tidak mengerti pemeriksaan oleh BPK. Begitu ada pemeriksaan, dia pergi, tinggalkan lari. Tah kemana-mana dia pergi. Tapi begitu pertemuan tidak bisa dibahas, tapi ketika pertemuan selanjutnya sudah menjadi LHP, batu dia teriak-teriak. Ini kelakuan jaman Orde Baru tinggalkan," ujar Cornelis.

Demikian juga dengan laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD terkait harus dikerjakan secara teliti. "Namun sekarang harus kita tunggu digit—demi digit. Jangan sampai salah ketik, misalnya kena Rp200 juta, tertulis Rp2 miliar. Karena sekarang kalau sudah ditentukan dalam LHP susah ngerobahnya," jelasnya.

Cornelis berharap, bila ada audit laporan keuangan oleh BPK, maka SKPD terkait segera menjelaskan dan mengklarifikasi jika ada kekeliruan. "Saya harap, pada saat ada temuan, saat itulah mendiskusikannya. Menjelaskan sejelas-jelasnya. Agar itu tidak menjadi temuan. Kalau hanya kesalahan tulis menulis bisa diklarifikasi langsung, tanpa menunggu sudah menjadi LHP. Kalau sudah jadi LHP, itu menjadi makanan orang, nah bisa selap," kata Gubernur Kalbar dua periode ini.

Ditambahkan Cornelis, PT. Garuda Indonesia, salah satu contoh kinerja perusahaan penerbangan yang belum tertata dengan baik administrasinya. "Salah satunya antara tiket dengan manifest. Kalau ketahuan pada saat itu kita minta dirubah, dicek. Karena biasa juga kita mendadak undangan ke Jakarta, hari ini acara, undangan datang malam. Akhirnya kita pakai tiket orang. Beli di calo. Itu terjadi karena penerbangan kita masih amburadul, Garuda saja nggak tentu rudu, meski sudah berplat merah. Kita aja bisa delay 5-6 jam. Apalagi perusahaan-perusahaan lainnya," kata dia.

Ia menilai, temuan yang seringkali terjadi diberbagai instansi karena ketidakseriusan lembaga tersebut dalam mengelola administrasinya. "Banyak temuan yang saya lihat, itu karena malas saja. Karena lalai, karena ketidaktahuan dia. Bahwa ini berbahaya, dianggap sepele, enteng. Tapi ketika sudah beredar diinternet, sudah dipanggil-panggil orang baru semua nglepar," tutup Cornelis. (dRe)